

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adriwilaga, Roestandi. *Hukum Agraria di Indonesia*. Bandung : Masa Baru, 1962.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan bintang, 1995
- A. Lucas dan C. Warren. *'The land, the law, and the people', in land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Athena : Ohio University Press, 2013.
- Cohen, Morris L & Kent C Olson. *Legal Research*. Minnesota: West Publishing Company, 1992.
- Creswell, John W. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Fourth Editionn. California : SAGE Publication, 2014.
- Effendi, A Masyhur. *Dimensi Atau Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994
- Erwiningsih, Winahyu. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta : Total Media, 2009
- Freeman, M.D.A. *Introduction of Jurisprudence*. London : Swett & Maxwell Ltd., 2001.
- Friedman, Lawrence M. *American Law, an Introduction*. New York : W.W. Norton & Company, 1984.
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Properti*. Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria di Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Universitas Trisakti. 2013
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Konsep Hukum, diterjemahkan oleh M Khosim. Bandung : Nusa Media. 2010

- Hatta, Mohammad. Alam Pikiran Yunani. Jakarta : P.T. Tinta Mas Indonesia, 1980.
- Hoogvelt, Ankie M. Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang. Jakarta : Rajawali, 1985.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Gazalba, Sidi. Sistematisa Filsafat. Buku Keempat, Pengantar Kepada Teori Nilai. Jakarta : Bulan Bintang, 2002.
- Gumelar, Agum. Reformasi Pertanahan. Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Holmen, Mark. Faith Begins at Home. Minnesota : Bethany House Publishers, 2005.
- Ismail, Nurhasan. Perkembangan Hukum Pertanahan. Pendekatan Ekonomi Politik. Jakarta : Penerbit Huma, 2007.
- K., Deininger. *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*, Washington DC and Oxford : World Bank and Oxford University Press, 2003.
- Kanjaya, Meshvara, Yongky Susilo. Retail Rules. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010.
- Kelsen, Hans. Dasar-dasar Hukum Normatif. Bandung : Nusa Media. 2008.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law & State. New Jersey : Transaction Publishers, 2006.
- Koesnoe, M. Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah. Surabaya : Ubaya Press, 2000
- Lebacqz, Karen. Teori-teori Keadilan. Bandung : Nusa Media. 2011
- Lestari, Retna D., Tri Wisudawati, Aris Prio. *Hukum Agraria dan Tata Ruang*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2022.
- Limbong, Bernhard. *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Rafi Maju Mandiri, 2012.
- Limbong, Bernhard. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum. Jakarta : Pustaka Margaretha, 2011.
- Locke, John. Second Treatise of Government and a Letter Concerning Toleration. Oxford : Oxford University Press, 2016.
- Locke L.E., Spirduso W.W. & Silverman S.J. Proposals that work : A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals. California : SAGE Publication, 2014.
- Mahasari, Jamaluddin. Pertanahan dalam Hukum Islam. Yogyakarta, Gama Media, 2008.
- Makfi, Samsudar. Masa Penjajahan Kolonial. (Singkawang : Maraga Borneo Tarigas, 2019)

- Marjuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenata Media, 2005.
- Ma'moen, Antje M. *Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan UU untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak atas Tanah di Kotamadya Bandung*. Bandung : UNPAD, 1996.
- McCarthy, John F. & Kathryn Robinson, *Land And Development in Indonesia*, ISEAS Publishing, Singapore, 2016
- Mcleod, Ian. *Legal Theory*. New York : Palgrave Macmillan, 2005.
- Muchin, Imam Koeswahyono dan Soimin. *Hukum Agraria Dalam Perspektif Sejarah*. Bandung : PT Refika Aditama, 2007.
- Mulyatno, C.B. *Berkeadilan Sosial Dalam Upacara Sadranan Warga Pedukuhan Sorowajan*. Yogyakarta : Penerbit PT Kanisius. 2015.
- Neilson, Jeff. *Land And Development in Indonesia*. Singapore : ISEAS Publishing, 2016.
- Noor, Aslan. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju, 2006.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta : Binacipta, 1984.
- Nugroho, Heru. *Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah*. Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002
- Parlindungan, A. P. *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Parlindungan, A.P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Mandar Maju, 1998.
- Petit, Philip. *An Introduction to Contemporary Political Philosophy*. London: Routledge, 1980.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Jakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya : Laksbang Justitia, 2010.

- Rawls, Jhon. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- Salim dan Septiana, Erlies. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Salim HS dan Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi. Buku Kedua. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2017
- Salim dan Septiana, Erlies. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi, Buku Ketiga. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Agraria. ( Bandung : Penerbit Reka Cipta, 2021.
- Sihombing, B. F. Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia. Jakarta : Toko Buku Gunung Agung, 2004.
- Singleton, Royce, Bruce C. Stratits. Approaches to Social Research. New York : Oxford University Press, 1988
- Sitorus, Oloan dan H. M. Zaki Sierrad. *Hukum Agraria di Indonesia : Konsep Dasar dan Implementasi*. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006
- Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. New York : the Modern Library. 1985.
- Sodiki, Achmad. Menuju Pembaharuan Hukum Agraria : Agenda Land Reform, Dalam Usulan Revisi UUPA. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Konsorsium Pembaharuan Agraria, 1998
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi, Suatu Pengantar. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soetiksno, Filsafat Hukum, Bagian I. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.
- Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Sumardjono, Maria S.W. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Sumardjono, Maria S.W. (et. al). Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan. cet. 2, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Sumardjono, Maria S.W. Penyempurnaan Undang Undang Pokok Agraria Dari Masa ke Masa. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2020.

- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Suseno, Franz Magnis. *Pemikiran Karl Marx. Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Sutikno, Iman. *Proses Terjadinya UUPA : Peran Serta Seksi Agraria UGM*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1987
- Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat. Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Tanya, Bernard L. dan Simanjuntak, Yoan N. dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010
- Teubner, Gunther. *Dilemmas of Law in the Welfare State*. Berlin-New York : Walter de Gruyter, 1986.
- Tehupeiory, Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Depok : Penerbit Raih Asa Sukses. 2012.
- Tehupeiory, Aartje. *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah*. Jakarta : UKI Press, 2019.
- Tehupeiory, Aartje. *Format Hukum Yang Melindungi Kepentingan Pemegang Hak Atas Tanah*. Jakarta : UKI Press. 2020.
- Tehupeiory, Aartje. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta : UKI Press, 2019.
- The Philosophy of John Locke New Perspectives*. London: Routledge, 2003.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Ichtiar, 1962.
- Winoto, Joyo. *Keynote Speech Kepala Badan Pertanahan Nasional. 'Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, 2010
- Wiradi, Gunawan. *Seluk Beluk Masalah Agraria. Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta : STPN Press, 2009.

### **Naskah Ilmiah**

- Gunawan Wiradi. *Jangan Perlakukan Tanah Sebagai Komoditas*. *Jurnal Analisis Sosial* Edisi 3/Juli 1996.



- El-Ghonemy. Land reform development challenges of 1963-2003 continue into the twenty-first century. Land Reform, 2003.
- Mak'moen, Antje. Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak Atas Tanah di Kotamadya. Disertasi Universitas Padjajaran, 1996.
- Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda. *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj, Volume 5 Nomor 1 tahun 2023.
- Mudjiono. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Yogyakarta : Jurnal hukum FH UII volume 14 no 3, Juli 2007.
- Priambodo, Bayu. Program Keluarga Harapan dari Perspektif Keadilan Amartya Sen. Surabaya : Jurnal Politik Indonesia Volume 5 no 1, 2019.
- Rhudi Prasetya. *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Kontrak Dalam Menyongsong Era Globalisasi*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2, 1997.
- Salam, Syukron dan Tri Andari Dahlan. *Sertifikat Ganda dan urgensi Pemutakhiran Peta Dasar Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta : Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 3 no 1 tahun 2021.
- Siri Terjesen. *Amartya Sen's Development as Freedom*. (Florida : Florida Atlantic University, 2004). Graduate Journal of Social Science - 2004 - Vol. 1 Issue 2 . Buku Development as Freedom is Amartya Sen's first book after receiving the Nobel
- Sri Hajati. Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi Dan Berkepastian Hukum. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014.
- Sri Hajati. Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Investasi. Surabaya : Universitas Airlangga, 2003.
- Susanto, Anthon S. Keraguan dan Keadilan dalam Hukum, Sebuah Pembacaan Dekonstruktif. Jakarta : Jurnal Keadilan, 2010.
- Theberg, Leonard. Law And Economic Development. Journal of International Law and Policy Volume 9 Number 2 : 231, 1980.
- Tukgali, Lieke L. *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Depok : Disertasi PDH UI, 2010

- Fadila. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal pembangunan dan pemerataan*, volume 9 no.1, 2019.
- Wibawa, Iskandar. Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus mbah Minah). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Zulpian Karno, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan (Non-Ligitasi) Melalui Mediasi Terhadap Syahnya Kepemilikan Sertifikat Ganda (Over Live) (Studi Di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya),” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 03, no. 03 (2016): 6–8, <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- M Aulia Reza Utama, “Peran Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan,” *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 133–52; Istijab, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.”

## **Kamus**

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Jilid Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, terdapat pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Simorangkir, J.C.T; Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembar Negara no 1960 - 104 )
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Ketetapan MPRS no II/MPRS/1960

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) atas Tanah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997

Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Permen ATR/KBPN Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

### **Putusan Badan Peradilan**

Putusan Pengadilan nomor 486/Pdt.G/2009/PN.Mdn

Putusan Pengadilan nomor 73/Pdt.G/2010/PN.Mdn

Putusan Pengadilan nomor 220/Pdt /2010/PN.Mdn

Putusan Mahkamah Agung nomor 1812/K/Pdt/2011

Putusan Pengadilan nomor 22/Pdt.G/2011/PN.Mdn

Putusan Mahkamah Agung nomor 643/K/Pdt/2012

Putusan Pengadilan nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Mdn

Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 K/Pdt/2014



Putusan Mahkamah Agung nomor 206/PK/Pdt/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 611 PK/Pdt/2016.

Putusan MK terkait dengan konstitusionalitas Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

#### Internet

<https://www.kompas.id/baca/metro/2021/05/07/tanah-tanah-incaran-mafia> [Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, Rabu (31/3/2021). Dino mendesak agar pemerintah dan penegak hukum menuntaskan kejahatan mafia tanah karena rumah dan tanah adalah salah satu elemen terpenting dalam hidup masyarakat.]

<https://manado.tribunnews.com/2013/05/20/kriteria-mafia-tanah-menurut-basuki> [Basuki pun menjelaskan ciri-ciri warga yang telah menjadi mafia. Mereka adalah yang menduduki lahan bukan kepemilikannya. Kemudian, apabila diancam dan dilaporkan polisi, ia akan menuduh hal tersebut sebagai tindakan intimidasi.]

<https://www.economist.com/leaders/2021/11/20/the-world-is-entering-a-new-era-of-big-government>

<https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/author/gilles-verniers/> menulis bahwa “2024 Polls Are BJP’s Worry. The repeal of contentious farm laws is a significant moment and a major political defeat for the Prime Minister and his government”

<https://www.climatepolicyinitiative.org/id/publication/improving-the-impact-of-fiscal-stimulus-in-asia-an-analysis-of-green-recovery-investments-and-opportunities/>

<https://www.rmoljabar.id/miliki-latar-belakang-ketua-hkti-prabowo-dinilai-cocok-jadi-mentan/> menulis bahwa "Memang kelebihannya, menjadi Menteri Pertanian bagi Prabowo jika akan maju lagi pada 2024 bisa dekat langsung dengan petani,"

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20181220/45/871555/pengoperasian-jalan-tol-dari-waktu-ke-waktu-ini-urutannya>, menulis bahwa Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah ruas jalan tol Trans-Jawa sekaligus menandai ketersambungan jalan bebas hambatan di Pulau Jawa, dilihat pada tanggal 31 Desember 2021

<https://www.jpnn.com/news/korban-mati-kelaparan-yahukimo-222-orang>

<https://mkn-unsri.blogspot.com/2009/12/filsafat-hukum-kant.html#comment-form>

<https://m.mediaindonesia.com/opini/473931/kartu-bpjs-sebagai-syarat-jual-beli-tanah-sudah-siapkah> Dr. Aartje Tehupeioriy menulis "koordinasi dengan kementerian terkait sangat diperlukan".

<https://www.boyyendratamin.com/2011/10/reforma-agraria-sebagai-jalan-keadilan.html> menulis bahwa "Sukar dipungkiri bahwa tidak memiliki tanah mempunyai andil bagi meningkatnya angka kemiskinan. Pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki tanah sebagai salah satu sumber ekonomi" Joyo Winoto, Phd (Kepala BPN RI )

<https://www.youtube.com/watch?v=Pe2kQE63ak8> Rhenald Kasali dalam video motivasinya berjudul "Karir Mereka Buyar Karena Cancel Culture, Seberapa Kuat Sebenarnya Budaya Ini?"

<https://www.youtube.com/watch?v=awFF399oMSo> CNN Indonesia mewawancarai Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Dwi Budi Martono mengenai mafia tanah pada tanggal 19 November 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=mhxRDd3I6nY>. Hariadi Kartodihardjo, MS. mengatakan dalam kuliah umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gajahmada pada tanggal 21 Oktober 2021 berjudul "Bank Tanah dan Ekonomi berkeadilan"

<https://youtu.be/R5FAzHeXVEQ>. Wawancara dengan Aartje Tehupeiorry pada tanggal 28 Januari 2023, dengan tema "Refleksi Akhir Tahun 2022 : Cara Mencegah Praktek Mafia Tanah".

[https://www.youtube.com/watch?v=vWY\\_Y03lauQ](https://www.youtube.com/watch?v=vWY_Y03lauQ). Penyampaian Nurhasan Ismail pada saat acara "Peluncuran Buku "Pengaturan Pertanahan Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Antara Dua Pilihan" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, pada tanggal 28 Mei 2022

<https://www.youtube.com/watch?v=FoHsVB-0Lqk> memuat pernyataan Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN, Iing R. Sodikin Arifin pada acara Konferensi Pers Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian ATR/BPN yang diadakan pada tanggal 1 Januari 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=6FSKNVRdWek> . Maria SW Sumardjono menyatakan dalam acara berjudul 'Diskusi Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Program Strategis Nasional' yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajahmada pada tanggal 27 September 2023, dilihat pada tanggal 9 November 2023

[https://www.babe.news/a/7101161237139948033?app\\_id=1124&c=wa&gid=7101161237139948033&impr\\_id=7101180356229646594&language=id&region=id&share\\_desc\\_type=two\\_special&user\\_id=6753987756995789825&user\\_id=0](https://www.babe.news/a/7101161237139948033?app_id=1124&c=wa&gid=7101161237139948033&impr_id=7101180356229646594&language=id&region=id&share_desc_type=two_special&user_id=6753987756995789825&user_id=0). Mahfud MD Bentuk Tim Khusus Berantas Masalah Mafia Tanah, KPK: Kami Siap Dukung

<https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/14/sp041422-curtain-raiser-sm2022> Kristalina Georgieva, IMF Managing Director pada tanggal 14 April 2022 di

Washington DC mengatakan : “To put it simply: we are facing a crisis on top of a crisis. First, the pandemic.....Second, the war: Russia’s invasion of Ukraine, devastating for the Ukrainian economy, is sending shockwaves throughout the globe. .... And for the first time in many years, inflation has become a clear and present danger for many countries around the world.”

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/38354>

<https://intercontinentalcry.org/the-power-of-community-how-cuba-survived-peak-oil/>

<https://m.tribunnews.com/nasional/2022/07/16/pejabat-bpn-jadi-tersangka-mafia-tanah-bermodal-cairan-pemutih-dan-cotton-bud-ubah-data-sertifikat?page=2>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20181220/45/871555/pengoperasian-jalan-tol-dari-waktu-ke-waktu-ini-urutannya> menulis bahwa Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah ruas jalan tol Trans-Jawa sekaligus menandai ketersambungan jalan bebas hambatan di Pulau Jawa, dilihat pada tanggal 31 Desember 2021

[https://www.youtube.com/watch?v=6Z\\_wWG7F11w](https://www.youtube.com/watch?v=6Z_wWG7F11w) Wawancara dengan Aartje Tehupeiory pada tanggal 29 Juni 2022, dengan tema “Membongkar Mafia Tanah,Mungkinkah?”

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220523134112-20-800093/jokowi-libatkan-kpk-bentuk-tim-khusus-berantas-mafia-tanah>

<https://inetizennews.wordpress.com/2020/03/16/mempertahankan-hak-ahli-waris-yang-dirampas-oleh-mafia-tanah-a-n-william-chandra/> mengungkapkan berita bahwa tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa membuat perjanjian surat Akta Jual Beli

<https://kumparan.com/pandangan-jogja/mahfud-md-mafia-tanah-bisa-bikin-yang-punya-sertifikat-asli-malah-masuk-penjara-1yk6YYIDBsA/full>

<https://barometernews.co.id/news/254.html> Bagi Sukarno tak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. “Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka,” begitu kata si Bung.

<https://www.youtube.com/watch?v=swmeLR6B6rY&t=22s> Nilai yang didapatkan MA pada tahun 2021 adalah sebesar 82,72 dan menurun menjadi 74,61 pada tahun 2022, dimana semakin rendah nilai yang didapatkan, maka resiko korupsi akan semakin besar. Sebagaimana disiarkan oleh laman Youtube KPK Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2022, berjudul “Peluncuran Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/16/07292771/dua-hakim-agung-tersangka-korupsi-pakar-hukum-ky-kebanyakan-makan-gaji-buta.> Dugaan korupsi yang

dilakukan dua hakim agung, yakni Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat”.

<https://nasional.tempo.co/read/1670128/suap-pengurusan-perkara-di-ma-kpk-sebut-hakim-yustisial-edy-wibowo-terima-rp-37-miliar> .Dalam rangkaian kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Edy Wibowo merupakan hakim yustisial ketiga yang ditetapkan status tersangka. Sebelumnya terdapat dua hakim yustisial, yaitu Prasetyo Nugroho dan Elly Tri Pangestu, yang sudah ditahan KPK.

<https://suamedianasional.co.id/pencegahan-dan-pemberantasan-praktek-mafia-tanah/>  
“Permasalahan tanah semakin pelik dan ruwet sebab melibatkan para mafia yang melakukan tindakan kejahatan terorganisasi sehingga kejahatan mereka sulit dilacak secara hukum, karena mereka berlindung dibalik penegakan dan pelayanan hukum” kata Aartje Tehupeioru pada artikel berjudul ‘Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Mafia Tanah’ di media online Suara Media Nasional pada tanggal 30 Desember 2022

<https://www.youtube.com/watch?v=hcfSgYfX-ww> . Maria SW pada acara wenas bertajuk “Masa Depan Penyelesaian Konflik Agraria”. Yang diselenggarakan oleh Legal Talk Society pada tanggal 6 Februari 2021

<https://news.detik.com/berita/d-3535678/kasus-suap-akil-mochtar-hamdan-jelaskan-kasus-pilkada-buton> . Kasus Suap Akil Mochtar, Hamdan jelaskan Kasus Pilkada Buton

[https://www.youtube.com/watch?v=6Z\\_wWG7F11w](https://www.youtube.com/watch?v=6Z_wWG7F11w) .Wawancara dengan Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan Halomoan Sianturi dan ahli pertanahan Artje Tehupeioru pada tanggal 29 Juni 2022,

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/02/12482861/mahfud-md-hukum-di-indonesia-sering-dijadikan-industri> “Hukum dibuat sedemikian rupa agar orang yang benar menjadi salah dan yang salah jadi benar. Seringkali di Indonesia itu hukum menjadi industri itu sendiri,” kata Mahfud MD pada tanggal 2 September 2020 saat menghadiri acara di Gedung Mahkamah Konstitusi.

<https://seide.id/tujuh-dosa-sosial-di-era-pandemi/> Tujuh Dosa Sosial adalah petuah yang dipopulerkan oleh Bapak India Mahatma Gandhi yakni politik tanpa prinsip – kekayaan tanpa bekerja – kesenangan tanpa hati nurani – pengetahuan tanpa karakter – perdagangan tanpa moralitas – ilmu tanpa kemanusiaan – dan agama tanpa pengorbanan.

[https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf\\_ben-xvi\\_enc\\_20051225\\_deus-caritas-est.html](https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html) “In a world where the name of God is sometimes associated with vengeance or even a duty of hatred and violence, this message is both timely and significant” ditulis oleh Paus Benediktus XVI pada ensiklik atau surat edaran Deus Caritas Est yang diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2005 di Roma.



<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/31/isi-lengkap-pidato-soekarno-pada-1-juni-1945-kini-dijadikan-sebagai-hari-lahir-pancasila?page=all> . dilihat pada tanggal 12 Februari 2023. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945: "Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek–ecomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

<https://www.hrw.org/id/news/2021/07/01/379120>. Menyatakan “Peraturan tersebut diadopsi pemerintah setelah [seorang ayah di Padang menyatakan bahwa anak perempuannya](#) dipaksa untuk mengenakan jilbab. [Laporan](#) Human Rights Watch terbitan Maret 2021 lalu menggambarkan perundungan meluas terhadap perempuan dan anak perempuan untuk mengenakan jilbab, yang dapat menimbulkan tekanan psikologis mendalam. Anak perempuan yang tidak menuruti peraturan ini dipaksa meninggalkan sekolah atau mengundurkan diri di bawah tekanan, sementara perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri, termasuk guru dan dosen universitas, kehilangan pekerjaan mereka atau mengundurkan diri.”

<https://www.youtube.com/watch?v=nue0F0kb6Cg>. Wawancara dengan Aartje Tehupeiory pada tanggal 25 Februari 2023, dengan tema “Pemerintah Menjamin Perlindungan Hukum Tanah Masyarakat Adat”.

<https://www.youtube.com/watch?v=6FSKNVRdWek>, Maria SW Sumarjono pada webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, berjudul “Diskusi Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Program Strategis Nasional” pada tanggal 27 September 2023

“Masih banyak yang belum memegang sertifikat, inilah yang menyebabkan sengketa tanah terjadi dimana-mana. Sebagaimana disiarkan oleh laman Youtube CNBC Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022, berjudul “Jokowi Bongkar Penyebab Sengketa Tanah”, sebagaimana terdapat pada <https://www.youtube.com/watch?v=93mybNoSscU>.

“Negara kita tidak akan sanggup menanggung biaya.... Nanti kita tidak bisa membayar karena cara kita me-manage-nya salah..... nggak akan kuat” Pernyataan Menteri Kesehatan pada rapat kerja DPR, sebagaimana termuat di media sosial Tiktok pada akun @drtonysetiobudi yang diposting pada tanggal 28 Januari 2023. Dilihat pada tanggal 31 Januari 2023



“Sebagian besar masyarakat NTT dan Maluku Utara diperkirakan tidak mampu mengonsumsi gizi berimbang masing-masing hingga lebih dari 80 persen dari total jumlah penduduknya”. Budiawan Sidik A. Rendahnya Asupan Nutrisi Masyarakat Indonesia. Ditulis pada tanggal 31 Januari 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/31/rendahnya-asupan-nutrisi-masyarakat-indonesia>. Dilihat pada tanggal 8 April 2023

Cantika Adinda Putri. Total Pengangguran Indonesia naik jadi 8,42 Juta Orang. Ditulis pada tanggal 7 November 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221107114840-4-385639/total-pengangguran-di-indonesia-naik-jadi-842-juta-orang>. Dilihat pada tanggal 8 April 2023

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/16/090000379/undang-undang-agraria-1870-isi-tujuan-pengaruh-dan-pelanggaran>. Dilihat pada tanggal 9 April 2023

[https://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Refleksi\\_Akhir\\_Tahun\\_2021\\_Satgas\\_Mafia\\_Tanah\\_dan\\_IBI\\_Berhasil\\_Tuntaskan\\_244\\_Kasus\\_Pertanahan](https://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Refleksi_Akhir_Tahun_2021_Satgas_Mafia_Tanah_dan_IBI_Berhasil_Tuntaskan_244_Kasus_Pertanahan). Sebanyak 244 kasus sudah ditangani, dari jumlah itu, sebanyak 80 kasus merupakan kasus pidana, 25 kasus telah divonis, sisanya sedang dalam proses sidik dan lidik,” kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Sunraizal, dalam Refleksi Akhir Tahun Kementerian ATR/BTN secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Jumat (31/12/2021). Dilihat pada tanggal 20 April 2021

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/26/gigitan-ular-yang-menewaskan-penjaga-sekolah-di-tengah-pembangunan-cirebon>. “Di Cirebon, kisah kematian Adila Oktavia yang berumur 4 tahun sempat viral akibat digigit ular yang habitatnya terganggu karena alih fungsi lahan ke perumahan”. Dilihat pada tanggal 1 Mei 2023.

<https://channel9.id/korban-mafia-tanah-dari-artis-hingga-mantan-pejabat/>. Dilihat pada tanggal 3 November 2023.

“Khususnya di Kota Semarang, lanjut Fahmi, terjadi perubahan peruntukan lahan secara signifikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Wilayah atas yang menjadi zona penyangga telah mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman, pusat pendidikan dan kawasan komersial. Sementara wilayah bawah, terutama pesisir mengalami kerusakan ekosistem akibat alih fungsi kawasan mangrove dan masifnya proyek reklamasi untuk industri dan perumahan mewah. <https://pantura.tribunnews.com/2023/01/23/ini-penyebab-bencana-ekologis-di-jateng-menurut-wahana-lingkungan-hidup-indonesia>.

[https://perkim.id/permukiman/perm\\_asalahan-lahan-di-indonesia-mengapa-sulit-diatasi/](https://perkim.id/permukiman/perm_asalahan-lahan-di-indonesia-mengapa-sulit-diatasi/). Salah satu faktor dominan yang menimbulkan permasalahan lahan di Indonesia adalah adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan, tercantum di Dilihat pada tanggal 5 November 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/13555171/kpk-dukung-tim-khusus-lintas-kementerian-berantas-mafia-tanah> Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan "KPK membantu penyelesaian sengketa lahan di Danau Singkarak, Maninjau, dan Limboto sebagai kekayaan negara, di mana KPK bersama para pemangku kepentingan terkait, menemukan penyalahgunaan area danau dan badan danau secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga hasil dari pemanfaatan danau tersebut belum masuk menjadi penerimaan negara" dilihat pada tanggal 19 November 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>. Dilihat pada tanggal 3 Desember 2023

<https://www.bps.go.id/indicator/170/442/1/nilai-input-menurut-provinsi.html>.

AFD/LUK. Pengungsi di Dalam Negeri Terus Meningkat. Koran Kompas, 20 Mei 2022.

AP/AFP/REUTERS/BEN/MHD. Ironi Isu Pangan Dunia. Koran Kompas, 20 Mei 2022.

AP/AFP/REUTERS/LUK/ABK. AP/AFP/REUTERS/LUK/ABK. Benediktus XVI, Paus Wariskan Budaya Kasih dan Kerelaan Hati. Jakarta : Koran Kompas, 6 Januari 2023.

AP/DNE. India. Petani Bergerak, Modi Batal Liberisasi Pertanian. Jakarta : Koran Kompas, 22 November 2021

AS, FX Laksana. Mantan Teman Sekelas. Jakarta: Koran Kompas, 29 November 2021

Agusta, Ivanovich. Desa 2045. Jakarta : Koran Kompas, 2 September 2022.

Anggorowati, Margaretha Ari. Beban Lonjakan Penduduk Dunia. Jakarta : Koran Kompas, 28 November 2022.

Ashri, Abdillah. "Angka ini tertinggi dibanding empat kelurahan lainnya". *Ancaman Mematikan di Balik Alih Fungsi Lahan*. Jakarta : Kompas, 29 April 2023.

Azra, Azyumardi. Kebangkitan Peradaban, Memperkuat Optimisme Muslim Asia Tenggara. Jakarta : Koran Kompas, 19 September 2022.

Basyari, Iqbal. Sertifikat Tanah Menembus Lautan. Jakarta : Koran Kompas, 12 Juni 2022.

Benny D. Koestanto. Arah Investasi Pascakrisis Ukraina. Jakarta : Koran Kompas, 13 Maret 2022

Budianto, Yoesep; Debora Laksmi Indraswari, Agustina Purwanti. Jakarta Bukan Lagi Tujuan Migrasi. Jakarta : Kompas, 4 Mei 2023.

Dewi, Saras. Nekropolitik. Jakarta : Koran Kompas, 7 Mei 2022.

Saras Dewi. Kredo Kekerasan. Jakarta : Koran Kompas, 11 Maret 2023.

DWA. "Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengaku optimistis akan desa-desa wisata akan menarik perhatian para wisatawan mancanegara : Dari yang ditargetkan sebanyak 550 juta untuk bulan ini saja sudah melampaui 600 juta wisatawan domestik. Berarti potensinya sangat besar sehingga banyak kemajuan kedepan ditopang oleh mereka". Desa Wisata Bakal Paling Cepat Pulih. Jakarta : Koran Kompas, 11 September 2022.

ERK. Staf BPN Jadi Tersangka. Jakarta : Koran Kompas, 15 November 2021.

ERK. Kasus Agraria, Terlibat Mafia Tanah, Pegawai BPN Dipecat. Jakarta : Koran Kompas, 19 Juli 2022. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hengki Haryadi, program PTSL yang mempermudah masyarakat memperoleh sertifikat tanah, dimanfaatkan mafia tanah dengan mencari tanah yang belum dibuatkan sertifikat, setelah itu dibuat dokumen palsu untuk bisa membuat sertifikat asli dimana pejabat BPN terlibat dengan membuat peta bidang atau gambar ukur palsu.

Heryanto, Ariel. Ukraina. Jakarta : Koran Kompas, 12 Maret 2022.

Hutagalung, Arie Sukanti. Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta : Universitas Trisakti, 2009.

Usman Hamid. "Adi Andojo Soetjipto : 'doorpregen de papieren', artinya pintu dan tembok kertas (hukum) bisa diterobos demi keadilan. dalam artikel 'Perginya Pejalan Keadilan'. Jakarta : Koran Kompas, 13 Januari 2022.

Indrayana, Denny. Mahkamah Konstitusi Galau, Undang Undang Republik Indonesia Cipta Kerja Kacau Balai. Jakarta : Koran Kompas, 3 Desember 2021.

Indraswari, Debora Laksmi, Yoesep Budiarto, Agustina Purwanti. Migrasi Penduduk, Kota Metropolitan Penyumbang Terbesar Arus Migrasi. Jakarta : Kompas, 4 Mei 2023.

Irianto, Sulistyowati. Putusan Hakim di Antara Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial. Koran Kompas, 28 Februari 2023.

I Soedradjad Djiwandono. Ekonomi Dunia Masih Tidak Menentu. Jakarta : Koran Kompas, 23 Maret 2022.

Kris Made dan Laraswati Ariadne Anwar. Membawa ASEAN ke kantong warga. Jakarta : Koran Kompas, 6 Februari 2023. "Dengan memilih "ASEAN Matters : Epicentrum of Growth" sebagai tema keketuaannya, Indonesia berusaha menjawab pertanyaan soal relevansi ASEAN. Indonesia juga berusaha menjawab secara praktis atas pertanyaan: Apakah ASEAN penting? Ketika menerima para menteri luar negeri ASEAN, Jumat (3/2/2023), Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya soal

pertumbuhan. ASEAN perlu menjaga kedamaian, kestabilan, dan keamanan kawasan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan. Pertemuan itu dilakukan sebelum para menlu ASEAN menghadiri Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) 2023. Mayoritas dari 53 paragraf pernyataan Ketua ACC dan AMM 2023 membahas kesejahteraan dan ekonomi.

Kwik Kian Gie. *Liberisasi Ekonomi Keablasan*. Jakarta : Koran Kompas, 20 Oktober 2021.

Kwik Kian Gie. *Revolusi Mental*. Jakarta : Koran Kompas, 14 Juni 2022.

Kurnia, Erika, Iqbal Basyari. *Memutus Rantai Jaringan Mafia Tanah di BPN*. Jakarta : Koran Kompas, 18 Juli 2022.

Latif, Yudi. *Rekonstruksi Pendidikan*. Jakarta : Koran Kompas, 4 Mei 2022.

Leba, Elsa Emiria, Wisnu Dewabrata, Dwi Bayu Radius. *Ramai-ramai Meninggalkan Kota, Membangun Desa*. Jakarta : Koran Kompas, 24 Oktober 2021.

Masrudin, Udin. perkuliahan Doktoral dengan mata kuliah “Hukum Ekonomi/Bisnis Dan Kebijakan Publik” Universitas Kristen Indonesia” pada tanggal 29 Juli 2022.

Muhammad Chatib Basri. *Kritik Menyelamatkan Pembangunan*. Jakarta : Koran Kompas, 2 Desember 2021. n

Muliawan, J. W. *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal: Sebuah Kajian Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat*. Jakarta : Cerdas Pustaka, 2009.

NSA. “Moeldoko : Presiden Minta Konflik Agraria di Sumut Diatasi”, Koran Kompas, 22 Oktober 2021.

NSA. *Sengketa Lahan, Polisi Cari Pelaku Kekerasan di Karo*. Jakarta : Koran Kompas, 20 Mei 2022.

Nugraheni, Arita/Litbang Kompas. *Jajak Pendapat Pekerjaan Rumah Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta : Koran Kompas, 26 Desember 2022.

Nugraheni, Siwi. *Energi-Energi Terbaru Untuk Desa*. Jakarta : Koran Kompas, 5 Juli 2022.

Nugraheni, Siwi. *Inflasi dan Dana Desa*. Jakarta: Koran Kompas, 1 Oktober 2022.

PDS. *Hakim Berpeluang Korupsi*. Jakarta : Koran Kompas, 15 Desember 2022. Penelitian Kuantitatif secara tatap muka terhadap 1200 responden di seluruh Indonesia, dari tanggal 26 September sampai 7 Oktober 2022, menghasilkan informasi bahwa 79,6% responden mengatakan petugas pengadilan meminta uang untuk mengurangi

- hukuman. Dipaparkan oleh Sekjen Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko.
- Prasetyantoko, A. Analisis Ekonomi : Transformasi Hijau. Jakarta : Koran Kompas, 23 November 2021
- Prasetyantoko, A. Transisi Dalam Resesi. Jakarta : Koran Kompas, 27 September 2022.
- Qurtuby, Sumanto Al. Mitos Dikotomi Budaya Timur-Barat. (Jakarta : Koran Kompas, 7 Mei 2022.
- Richar A. Slaughter. New Thinking for New Milenium. Mitos Milenium Ketiga. Jakarta : Koran Kompas, Rabu 24 Januari 2001.
- Rosmidah. Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. Yogyakarta: Jurnal Bhumi, volume 6, 2013.
- Sakti, Ranga Eka, Toto Suryaningtyas. Kinerja Bidang Hukum Dinilai Melemah. Jakarta : Koran Kompas, 18 Oktober 2021
- Saputra, Wempi. Mampukan G20 Menavigasi Krisis Multidimensi. Jakarta : Koran Kompas, 3 Juni 2022.
- Saras Dewi. Menjalani Filsafat Indonesia. Jakarta : Koran Kompas, 2 Oktober 2021
- Sembiring, Julius. Tanah Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Yogyakarta: Mimbar Hukum Volume 23, nomor 2. 2011
- Sidik, Budiawan A, Agustina Purwanti, Yoesep Budianto, Debora Laksmi Indraswari. Ekonomi, Pendorong Utama Migrasi. Jakarta : Kompas, 4 Mei 2023.
- Siwi Nugraheni. Desa-desa Yang Menggeliat. Jakarta : Koran Kompas, 2 November 2021.
- Sofian Effendi. Publikasi Ilmiah dan Kebijakan Publik. Jakarta : Koran Kompas, Jumat 15 Oktober 2021.
- Sukidi. Soekarno-Hatta dan Indonesia Hari Ini. Jakarta : Koran Kompas, 9 Februari 2023. “Arsitek republik ini mewariskan mimpi indah tentang tiadanya kemiskinan di dalam Indonesia merdeka”.
- Sukidi. Menagih Janji Keadilan Sosial. Jakarta : Koran Kompas, 6 April 2023.
- Sukidi. Mafia, Negara dan Rakyat. Jakarta : Koran Kompas, 15 Desember 2022.
- Sukidi. *Kemiskinan di Tengah Ketamakan Pemimpin*. Jakarta : Kompas, 4 Mei 2023. “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing (Bartlett’s Familiar Quotations, 1968).”



- Sumardjono, Maria, SW. Pengalaman Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria di Republik Afrika Selatan: Peluang dan Tantangan dalam Implementasinya di Indonesia”. Carita : Lokakarya Komnas HAM, 2004.
- Survey Kepemimpinan Nasional. Alarm Rakyat Untuk Pemerintah. Jakarta : Koran Kompas, 18 Oktober 2021.
- Susanti, Bivitri. Legislasi Untuk Siapa? Jakarta : Koran Kompas, 6 Januari 2022
- Susanti, Bivitri. Analisis Politik : Atas Nama Pembangunan. Jakarta : Koran Kompas, 11 November 2021.
- Susanti, Bivitri. Otoritarianisme dan Hukum. Jakarta : Koran Kompas, 5 Januari 2023.
- Syarif Hidayatullah, Muhammad. Arah Ekonomi Digital 2022. Jakarta : Koran Kompas, 17 Januari 2022.
- SYA/DEA. Runtuhkan Ego Sektoral Untuk Reforma Agraria. Jakarta : Koran Kompas : 10 Juni 2022
- SYA/BOW/DEA/APA. Jajak Pendapat Kompas. Sanksi Publik Menanti Jika Kinerja DPR Tak Membaik. Jakarta : Koran Kompas, 25 Oktober 2021.
- Tajuk Rencana. Kaderisasi Pemimpin di Singapura. Jakarta : Koran Kompas, 8 Juni 2022.
- Tajuk Rencana. Negara Belum Kalah. Jakarta : Koran Kompas, 12 Januari 2023.
- Tanuredjo, Budiman. Dari Demokrasi ke Yuristokrasi. Jakarta : Koran Kompas, 12 Februari 2022.
- Tanuredjo, Budiman. Deindustrialisasi Politik. Jakarta : Koran Kompas, 31 Desember 2022.
- Tanuredjo, Budiman. *Pengakuan Pariyem*. Jakarta : Koran Kompas, 18 Maret 2023.
- Tajuk rencana. Buah Diplomasi Presiden Jokowi. Jakarta : Koran Kompas, 2 Juli 2022.
- Mukhamad Kurniawan. Mengejar Visi Kesejahteraan. Jakarta : Koran Kompas, 30 Desember 2021.
- Yuda, Tauchid Komara. “Gejala masyarakat tidak bahagia di negara kesejahteraan barangkali dapat dihubungkan dengan perasaan kekurangan relatif”. *Negara Kesejahteraan atau Masyarakat yang Sejahtera?* Jakarta : Kompas, 28 Januari 2023.
- Dr Aartje menyatakan 'tanpa sosialisasi yang memadai dan komunikasi yang cukup, akan timbul masalah dan itu menyebabkan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat". Radio RRI Pro3 FM tanggal 20 Februari 2022.

Yudi Latif. *Memimpi dan Memimpin Kejayaan*. Jakarta : Koran Kompas, 18 Agustus 2022.

XTI. *Alih Fungsi Lahan Ancam Ketahanan Pangan Jateng*. Jakarta : Kompas, 2 Februari 2023

Yudi Latif dalam <https://www.instagram.com/p/CfmzL8VBtcy/?igshid=MDJmNzVkMjY=>

